

Anggaran Dinkes Banjarmasin Mengalir Deras ke RSUD Sultan Suriansyah



Setelah diresmikan, RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin masih membutuhkan beragam fasilitas. Maka tak salah jika anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin mengalir deras ke rumah sakit tersebut.

Kepala Dinkes Banjarmasin Machli Riyadi mengemukakan, 2020 pihaknya dapat anggaran Rp 218 miliar. Sebesar Rp 102 miliar diprioritaskan untuk RSUD Sultan Suriansyah.

Anggaran ini nantinya diperuntukkan untuk proyek pembangunan pagar, pembelian obat-obatan. Karena terhitung 6 Januari 2020 RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin membuka pelayanan untuk BPJS.

Di samping itu, Machli juga menerangkan jika pihaknya sejauh ini sedang melakukan pemenuhan standar minimal hak dasar masyarakat untuk memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Matnor Ali mengemukakan, pengawasan dilakukan agar jalannya kinerja SKPD berjalan lebih baik dari tahun 2019, dan serapan anggaran tak lagi terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Matnor menjelaskan, anggaran yang sudah dianggarkan ke Dinas Kesehatan mesti dapat diawasi dalam penyerapannya, sebab ini erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak.

Anggaran di Dinkes ini masih terserap banyak untuk RSUD Sultan Suriansyah, apalagi sekarang mulai hari ini di RS itu sudah dapat melayani anggota BPJS. Sehingga Matnor mendesak kepada Dinkes agar fasilitas-fasilitas yang sudah ada di sana, seperti ruang rawat inap segera diselesaikan. Selain itu Matnor pun meminta dari anggaran yang diperuntukkan untuk Alat Kesehatan (Alkes) harus memadai jangan sampai abal-abal.

Sumber Berita:

1. <http://apahabar.com>, *Anggaran Dinkes Banjarmasin Mengalir Deras Ke RSUD Sultan Suriansyah*, Senin, 6 Januari 2020
2. <https://antaranews.com>, *Legislatif Ingatkan RSUD Sultan Suriansyah Tak Beli Alkes Abal-abal*, Selasa, 7 Januari 2020

Catatan Berita:

Rumah Sakit Daerah (RSD), baik rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus, adalah salah satu garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Banyak sekali anggota masyarakat yang mengandalkan kebutuhan pelayanan kesehatannya kepada institusi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota ini.

Secara umum kemajuan RSD tetap terlihat nyata dan hampir merata di semua daerah. Ke depan, tantangan dan beban RSD akan menjadi lebih berat, karena program Jaminan Kesehatan Nasional harus berjalan lebih baik dan tentu juga harus mampu berkompetisi di dunia industri RS yang semakin mengglobal.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSD. Sistem PPK-BLUD telah memungkinkan RSD lebih fleksibel dalam mengelola keuangannya, tidak terlalu terikat dengan prosedur yang kadangkala kaku dan rumit. Terbukti, sekitar 70 persen RSD di daerah telah menerapkan PPK-BLUD, mengalami perkembangan cukup signifikan baik dalam pelayanan maupun kinerja keuangannya dengan menerapkan sistem ini.

Kedudukan RSD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 dan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum itu, RSD merupakan unit kerja dari Dinkes (Dinas Kesehatan).

Dengan status ini, anggaran RSD, merupakan bagian langsung dari APBD. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan konsolidasi langsung di bawah otoritas keuangan Pemda.